

BAB I

PENDAHULUAN

Isu-isu narkoba yang muncul di Amerika Serikat merupakan problem atau kasus lama yang mengakar dan belum bisa disembuhkan. Dalam hal ini, banyaknya kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Amerika Serikat dari masa ke masa. Kebijakan tersebut tertuang dalam *Drug on War* yang mengusung bagaimana strategi-strategi serta upaya apa saja yang harus dilakukan bagi setiap pemimpin Amerika Serikat dalam menangani kasus narkoba.

A. Latar Belakang

*Drug on War*¹ telah diinisiasi oleh Amerika Serikat sejak tahun 1968. Hal ini dimulai ketika Presiden Amerika Serikat yaitu Richard Nixon yang terpilih menjadi presiden dan mulai memerangi narkoba dengan menyatakan penggunaan narkoba adalah "musuh publik nomor satu". Saat itu, fokus utama Richard Nixon adalah untuk memberhentikan upaya aliran narkoba-narkoba yang beredar di Amerika Serikat. Pada tahun tersebut, merupakan tahun dengan banyaknya pasar serta produksi ganja dan heroin di luar negeri (Hodge, 2021). Namun, selama tahun 1970-an, permintaan kokain Amerika Serikat yang meningkat menyebabkan terciptanya kartel-kartel narkoba yang mulai memproduksi kokain.

Pada bulan Juni 1971, Presiden Nixon mendeklarasikan *Drug on War* untuk melawan narkoba. Dengan pernyataan Nixon tersebut, Amerika Serikat telah meningkatkan ukuran dan kehadiran agen pengawasan obat federal, dan mendorong melalui langkah-langkah seperti hukuman wajib dan surat perintah larangan. John Ehrlichman yang merupakan seorang penasihat *White House* pada masa itu membuat pernyataan bahwa kampanye *Drug on War* memiliki posisi yang sangat penting. Pada tahun 1968, isu-isu yang paling populer di

¹Branding dari media Amerika Serikat terkait kampanye pemerintah AS yang berusaha untuk menangani permasalahan penggunaan obat-obatan terlarang. nama yang diberikan media sejak tahun 1970-an untuk berbagai program pemerintah AS yang mencoba menghentikan penggunaan obat-obatan terlarang. *Drug on War* dinilai sebagai program yang mengkampanyekan informasi kepada public sebagai bentuk upaya untuk menghentikan perdagangan narkoba dan kecanduan narkoba.

Amerika Serikat adalah anti perang dan masalah-masalah yang disebabkan oleh orang kulit hitam. Saat itu, orang kulit hitam juga disamakan dengan kaum *hippie* yang dimana mereka gemar mengkonsumsi mariyuana. Sementara itu, orang kulit hitam biasanya mengkonsumsi narkoba jenis heroin. Pemerintah Amerika Serikat menyatakan bahwa akan mengkriminilisasi bentuk tindakan penggunaan narkoba jenis mariyuana dan heroin. Hal tersebut yang membuat pemerintah Amerika Serikat juga mampu untuk menangkap ketua komunitas atau kelompok-kelompok yang terlibat bahkan tindakan seperti menggerebek rumah maupun markas, membubarkan pertemuan yang dihadiri kelompok-kelompok tersebut, dan juga turut memberitakan hal-hal negatif mengenai komunitas mereka yang justru menjerumuskan kepada tindakan diskriminasi pada saat itu. Presiden Nixon pada masa itu juga telah menempatkan mariyuana sebagai kategori obat yang paling ketat di kategori *Schedule I* yang kemudian juga ditinjau komisi yang ditunjuk oleh Presiden Nixon sendiri yaitu pimpinan Gubernur Pennsylvania dari Partai Republik Raymond Schafer (David Downs, 2016).

Menuju era modern saat ini, tujuan perang melawan narkoba (*Drug on War*) konteksnya semakin luas dan tidak hanya mengenai isu-isu narkoba saja cakupannya. Saat ini tujuan *Drug on War* adalah untuk benar-benar memberantas semua penyakit sosial, ekonomi, dan kesehatan yang terkait dengan narkoba dan penyalahgunaan narkoba. Hal ini dipaparkan langsung dari seorang Professor Ekonomi Universitas George Mason yaitu Christopher Coyne. Coyne beropini bahwa masa seperti sekarang tujuan *Drug on War* tidak lebih ambisius untuk menumpaskan segala bentuk kekerasan dan penyakit sosial yang merupakan akar dari munculnya isu-isu narkoba di Amerika Serikat (Coyne, 2017).

Semenjak 1971 sampai sekitar tahun 2019, Amerika Serikat telah menghabiskan lebih dari satu triliun dolar untuk menegakkan kebijakan obatnya, menurut penelitian dari University of Pennsylvania. Namun banyak pengamat, baik liberal maupun konservatif, mengatakan perang melawan narkoba (*Drug on War*) belum membuahkan hasil (Betsy Pearl, 2018).

Kampanye yang dicetuskan oleh Presiden Richard Nixon ini telah menjangkau banyak pemerintahan dan mengarah pada pembentukan sebuah badan federal khusus yaitu *Drug Enforcement Administration* (DEA). Tantangan yang muncul dari penggunaan narkoba adalah tantangan internasional yang paling dominan di Amerika Serikat. Sebanyak 12% pengguna narkoba global berasal dari negara itu, tiga kali proporsi populasi Amerika Serikat dibandingkan dunia. Hal pertama yang menjadi ancaman adalah bagaimana penyalahgunaan narkoba di Amerika Serikat sudah menjadi masalah sosial yang umum. Pusat Statistik Penyalahgunaan Narkoba Amerika Serikat atau *National Center for Drug Abuse* (NCDAS) mencantumkan delapan kategori obat yang paling umum digunakan di negara ini: alkohol, ganja, kokain, fentanil, opioid (terutama merujuk pada zat psikotropika yang terkendali), stimulan resep, metamfetamin, dan heroin. 46% pengguna narkoba AS melaporkan memiliki pengalaman menggunakan ganja dan stimulan resep, 36 persen opioid dan metamfetamin, 31 persen stimulan resep, 15 persen heroin, dan 10 persen kokain (MFA News, 2023).

Meskipun terjadi penurunan tajam dalam penggunaan obat-obatan terlarang di tahun-tahun sebelumnya, penggunaan narkoba di AS meningkat lagi dan lebih cepat dari sebelumnya. Menurut Administrasi Layanan Penyalahgunaan Zat dan Kesehatan Mental, jumlah pengguna narkoba naik menjadi 13% orang Amerika berusia 12 tahun atau lebih pada tahun 2019, hampir mencapai puncaknya dari 40 tahun yang lalu. Jika tujuan dari perang melawan narkoba adalah untuk mengurangi penggunaan narkoba dan mencegah kematian terkait narkoba, itu tidak membuat banyak kemajuan. Beberapa tahun kebelakang, sebanyak 48,2 juta orang Amerika di atas usia 18 tahun mengonsumsi ganja setidaknya sekali. Sekitar antara tahun 2018 dan 2019, penggunaan zat tersebut meningkat menjadi 15,9%. Meskipun dilarang oleh otoritas federal, ganja legal di 15 negara bagian untuk penggunaan rekreasi. Industri ganja di negara itu melonjak meskipun terjadi pandemi COVID-19. Ketika banyak bisnis tutup pada Maret 2020 di tengah pandemi, apotek ganja di delapan negara bagian yang melegalkan zat tersebut dapat mempertahankan

bisnis yang dianggap legal ini karena penjualan diizinkan untuk dilanjutkan selama periode karantina massal di rumah. Akibatnya, penjualan ganja legal di Amerika Serikat mencapai rekor 17,5 miliar dolar AS pada tahun 2020, naik 46 persen dari tahun 2019, menurut BDSA (*Business and Defense Services Administration*), sebuah platform yang menyediakan data penjualan ganja (MFA News, 2023).

Sebuah studi memperkirakan bahwa sebanyak 10,1 juta orang Amerika Serikat telah mengonsumsi opium setidaknya sekali. Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC), narkotika jenis opioid adalah pendorong utama lonjakan kematian terkait narkoba. Antara April 2020 dan April 2021, 75.000 orang Amerika meninggal karena penggunaan opium yang berlebihan. Ada sekitar kurang lebih 75% dari total kematian akibat overdosis obat dan peningkatan 50% dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, temuan NCDAS (*National Center for Drug Abuse Statistics*) menunjukkan sekitar 19,4% penduduk Amerika Serikat telah menggunakan zat ilegal setidaknya satu kali. Dari 280 juta orang berusia 12 tahun ke atas, 31,9 juta adalah pengguna narkoba, dengan 11,7% menggunakan zat ilegal dan 19,4% mengonsumsi obat-obatan terlarang atau yang menyalah-gunakan obat resep pada tahun 2020 (CDC, 2022).

Dalam pelaksanaan kampanye *Drug on War*, setiap Presiden Amerika Serikat selalu mengeluarkan kebijakan yang terfokus untuk mengurangi dan mengatasi permasalahan narkoba di Amerika Serikat. Seperti yang dilakukan oleh Presiden Barack Obama selama menjabat sebagai presiden. Terhitung selama masa jabatannya yaitu tahun 2009 sampai tahun 2017, Obama mengerahkan beberapa kebijakan terkait *Drug on War*. Barack Obama telah melakukan beberapa langkah dalam mengatasi masalah narkoba, antara lain sebagai berikut: Pengadaan *Fair Sentencing Act* pada tahun 2010 untuk mengatasi perbedaan hukuman antara pengguna kokain *crack* dan bubuk. Tindakan tersebut bertujuan untuk mengurangi hukuman minimum bagi pengguna *crack* dan membuat hukuman bagi pengguna bubuk menjadi lebih adil. Undang-undang ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang

penggunaan narkoba di kalangan generasi muda dan mendorong Kampanye Media Nasional Anti Narkoba Remaja (*National Youth Anti-Drug Media Campaign*) untuk meningkatkan kesadaran tentang penggunaan narkoba di kalangan generasi muda dan anak-anak.

Sementara itu pada era Donald Trump, fokusnya adalah menekankan pentingnya memberantas kasus narkoba dan menerapkan tindakan hukum. Trump juga menekankan pentingnya program rehabilitasi dan pendidikan masyarakat untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba. Ia juga mendorong kerja sama antar negara untuk memerangi perdagangan narkoba dan mempertahankan kendali atas perdagangan narkoba. Hal ini menghasilkan kemitraan strategis dengan negara-negara seperti kerjasama Amerika Serikat dengan Mexico untuk melawan perdagangan narkoba. Selain itu, Trump juga berupaya mengurangi penggunaan opioid dan mengatasi krisis opioid, yang telah menyebabkan 42.000 dari 64.000 kematian di Amerika Serikat akibat overdosis opioid.

Berbagai kebijakan sudah dikerahkan oleh Barack Obama dan Donald Trump untuk memberantas permasalahan narkoba di Amerika Serikat bertahun-tahun lamanya. Namun, program serta kebijakan mereka tetap menuai kritik. Muncul opini-opini yang menyatakan bahwa baik kebijakan Obama maupun Trump masih berfokus pada hukuman dan kurang memberikan perhatian pada rehabilitasi dan pencegahan penggunaan narkoba. Meski ranah yang diambil oleh Donald Trump sudah mendekati penanganan untuk menekan krisis opioid dengan strategi pencegahan penyalahgunaan narkoba. Namun, masih banyak pihak yang merasa bahwa tindakan Donald Trump tidak memuaskan karena angka kasus pengguna narkoba (segala jenis obat yang dilarang oleh *US Policy*) belum berkurang signifikan (Collins, Donald Trump's interim Opioid Commission report did not mention drug courts. Here's why that's a positive step, 2017).

Drug on War merupakan hal yang akan selalu menjadi perdebatan. Tingkat relevansinya dari masa ke masa akan terus menjadi pertanyaan bagi segenap pihak mengingat belum ada presiden yang bertindak secara maksimal

dalam memerangi narkoba. Sebagai seorang presiden, tentunya Joe Biden memiliki kemungkinan untuk lebih fokus dengan beberapa tindakan termasuk penegakan hukum dan kebijakan kesehatan yang lebih komprehensif. Keaktifan Joe Biden untuk menyuarakan *Drug on War* sebagai presiden pun menjadi sebuah harapan bahwa Amerika Serikat dapat memerangi narkoba di era yang baru. Perang melawan narkoba telah menjadi kegagalan kebijakan yang menjadi rahasia umum bagi Amerika Serikat setelah hampir lima dekade tidak ada hasil yang signifikan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari pemaparan masalah diatas, rumusan masalah yang penulis temukan adalah *Bagaimana strategi drug on war Presiden Barack Obama, Presiden Donald Trump dan Presiden Joe Biden dalam mengatasi permasalahan narkoba di Amerika Serikat?*

C. Kerangka Teori

1. National Security Theory

Keamanan nasional merupakan konsep yang dimiliki setiap negara yang tidak terikat dengan nilai-nilai demokrasi. Hal ini telah berkembang seiring berjalannya waktu, dengan definisi tradisional yang berfokus pada pentingnya keamanan nasional dan kebutuhan akan lingkungan nasional yang stabil. Namun, konsep ini telah berkembang seiring dengan reformasi demokrasi, perubahan dunia yang lebih terorganisir, dan terglobalisasi. Pada tahun 2004, *World Bank* mengidentifikasi isu-isu ekonomi dan sosial, konflik transnasional transnasional, konflik internal, terorisme, dan kekerasan massal sebagai isu global. Keamanan nasional merupakan sebuah konsep global yang mencakup tidak hanya kepentingan dan tindakan nasional tetapi juga kepentingan seluruh bangsa. Ini adalah konsep kompleks yang melibatkan berbagai aspek seperti perekonomian domestik dan struktur sosial. Diplomasi diplomatik harus merespons dinamika kekuasaan dalam sistem internasional, dan keamanan nasional sering kali terkait dengan tindakan berbagai aktor, seperti eksekutif, yudikatif,

pemerintah, badan legislatif, partai politik, kelompok ekonomi, dan komunitas etnis (Bagley, 2015).

Kebijakan keamanan nasional mencakup keputusan dan tindakan yang dianggap penting untuk melindungi nilai-nilai inti domestik dari ancaman eksternal. Pendekatan keamanan nasional memberikan interpretasi menyeluruh untuk mempelajari kebijakan luar negeri. Kaum realis percaya bahwa perilaku diplomatik harus merespons terutama pada penyebaran kekuasaan dalam sistem internasional. Munculnya berbagai asumsi seperti kekuatan ekonomi domestik dan struktur sosial sangat penting. Hal ini yang membuat konsep *national security* dapat berinteraksi juga dengan pemutusan kebijakan luar negeri karena keterkaitan ancaman asing dengan beragam hal internal. Menurut Arnold Wolfers, *national security* atau keamanan nasional ini merupakan hal yang rancu. Dalam hal ini, keamanan digunakan untuk mencakup banyak tujuan yang sebenarnya susah untuk dikaitkan apakah masih relevan dengan pemahaman konsep keamanan nasional yang bersifat secara universal. Namun terlepas dari kerancuan pengertiannya itu sendiri, konsep keamanan nasional ini masih berkaitan dengan bagaimana aktor negara sebagai pembuat kebijakan menilai adanya ancaman yang berbahaya atau bagaimana lembaga eksekutif, pejabat, lembaga pemerintah, panitia legislatif, partai politik, ekonomi kelompok kepentingan, dan komunitas etnis mendefinisikan ancaman itu sendiri (Lemer, 1990).

Pada awal abad ke-20, paham nasional maupun internasional membuat sejumlah besar obat psikoaktif menjadi ilegal. Gerakan historis menuju kriminalisasi produksi, perdagangan, dan penggunaan obat-obatan tersebut merupakan kesamaan yang dibuat antara praktik sosial dan gerakan keamanan yang dilakukan oleh banyak negara di seluruh dunia. Pada negara Amerika Serikat, hal ini dapat diikuti dengan mempelajari bagaimana perspektif moral terkait dengan teknologi pemerintahan yang muncul. Menurut sistem keamanan nasional, ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi mengenai obat-obatan psikoaktif yaitu problematisasi dan

sekuritisasi untuk menunjukkan bagaimana beberapa obat menjadi sebuah masalah moral, kesehatan sosial, dan keamanan yang menuntut langkah-langkah keamanan oleh negara. Kerangka yang diusulkan memiliki lima tingkat yang saling berhubungan yaitu tingkat praktik moral atau sosial, tingkat kesehatan masyarakat, tingkat keamanan publik, tingkat keamanan nasional, dan tingkat keamanan internasional (Morales, 2007).

Amerika Serikat telah memasuki era baru dalam *drug-diplomacy*. Contohnya saja dalam kebijakan luar negerinya terhadap Amerika Latin semenjak beberapa dekade yang lalu. Kontrol dari perdagangan narkoba saat ini peringkatnya lebih tinggi dari imigrasi, utang luar negeri, dan ekspansi komunis di Amerika Tengah sebagai prioritas masalah dalam hubungan AS-Amerika Latin. Pada Maret 1988 New York Times/CBS News mengadakan polling dan sebanyak 48% responden menunjukkan perdagangan narkoba dan obat larangan adalah masalah kebijakan luar negeri yang paling penting yang dihadapi dengan Amerika Tengah (22%), pengendalian senjata (13%), terorisme (9%), dan kerusuhan Palestina (4%). Polling tersebut menanyakan apakah lebih penting menghentikan perdagangan narkoba para pemimpin Amerika Tengah atau mendukung mereka dalam perjuangan terhadap komunisme. Sebanyak 63% responden memberikan prioritas utama untuk menghentikan perdagangan narkoba. Berbanding dengan pilihan 21% responden yang merasa bahwa menghentikan komunisme adalah tindakan yang lebih penting (Elaine Sciolino, 1988).

2. Human Security Theory

Human security theory merupakan sebuah paradigma untuk memahami kerentanan global yang menantang gagasan tradisional tentang keamanan nasional melalui keamanan militer dengan menyatakan bahwa rujukan yang tepat untuk keamanan harus berada di tingkat manusia daripada tingkat nasional. Keamanan manusia berarti melindungi kebebasan mendasar dan melindungi orang-orang dari ancaman dan situasi yang kritis dan meluas. Pendekatan ini berguna untuk membantu negara-negara dalam

mengidentifikasi dan mengatasi tantangan yang tersebar luas dan lintas sektoral terhadap kelangsungan hidup, mata pencaharian, dan martabat rakyat mereka. *Human security* atau keamanan manusia berkaitan dengan hubungan kausalitas antara berbagai jenis ancaman dan kerentanan dan cara mereka berinteraksi untuk menciptakan ketidakamanan (Tanaka, 2018).

Teori *human security* melibatkan beberapa aspek yang terkait erat dengan keamanan manusia. Beberapa aspek yang terkait dalam teori Human Security antara lain sebagai berikut.

- a. Keamanan fisik: mencakup keamanan perorangan, kelompok-kelompok atau masyarakat secara keseluruhan dari ancaman langsung seperti kekerasan terorganisir, terorisme, dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya.
- b. Keamanan ekonomi: mencakup ketahanan ekonomi individu dan masyarakat, meliputi jaminan penghidupan yang layak, akses terhadap sumber daya dan peluang usaha, hak atas tanah dan sumber daya alam, dan sebagainya.
- c. Keamanan lingkungan: mencakup kelestarian lingkungan serta keseimbangan ekosistem global dan nasional.
- d. Keamanan pangan: mencakup akses terhadap makanan yang bergizi, sebuah pasokan makanan yang berkelanjutan, keamanan pangan, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola pangan.
- e. Keamanan kesehatan: mencakup upaya pencegahan, pengobatan, pengendalian dan penelitian dalam segala bentuk penyakit dan kesehatan masyarakat.
- f. Keamanan politik: meliputi akses ke badan pemerintahan secara demokratis dan hak kebebasan berbicara dan berkumpul.
- g. Keamanan budaya: meliputi hak untuk hidup dalam budaya mereka sendiri baik dalam kaitan dengan tata cara hidup, bahasa, adat istiadat, serta memelihara identitas kultural.
- h. Keamanan sosiologis: meliputi terhadap stres sosial, disintegrasi kelompok, pelanggaran hak asasi manusia, dan masalah-masalah sosial (United Nations, 2023).

Salah satu ancaman yang berdampak terhadap keselamatan individu setiap manusia adalah isu narkoba. Narkoba dapat mengancam dari segi keamanan yang mengharuskan negara mengeluarkan kekuatan militernya. Seperti contohnya adalah negara Amerika Serikat yang mengalami krisis narkoba di negaranya yang mengancam warga negaranya. Bahkan, narkoba dapat mengancam manusia untuk mengalami overdosis. Seperti halnya Amerika Serikat yang mengalami krisis narkoba dan peningkatan jumlah penggunaan obat-obatan terlarang (Drug Enforcement Administration, 2021).

3. *Non-Traditional Security Theory*

Keamanan Non-Tradisional mengacu pada tantangan terhadap kelangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat dan negara yang terutama timbul dari sumber-sumber non-militer, seperti perubahan iklim, kelangkaan sumber daya, penyakit menular, bencana alam, migrasi tidak teratur, kekurangan pangan, penyelundupan manusia, perdagangan narkoba, dan kejahatan transnasional. Ancaman-ancaman ini seringkali bersifat transnasional, sehingga memerlukan respons politik, ekonomi, sosial yang komprehensif, dan terkadang penggunaan kekuatan militer. Permasalahan *Non-Traditional Security* memerlukan keterlibatan berbagai aktor, termasuk negara, organisasi internasional, dan aktor transnasional, untuk mengatasi tantangan ini secara efektif (Anthony, 2019).

Non-Traditional Security berfokus pada ancaman non-militer dengan ciri-ciri umum sebagai berikut.

- a. Bersifat transnasional berkaitan dengan asal usul, konsepsi, dan dampaknya
- b. Bukan berasal dari persaingan antar negara atau pergeseran keseimbangan kekuasaan, namun sering kali didefinisikan dalam istilah politik dan sosio-ekonomi
- c. Menyebabkan ketidakstabilan sosial dan politik, mempengaruhi individu dan masyarakat

Pendekatan keamanan non-tradisional menawarkan solusi yang berkembang terhadap permasalahan narkoba dengan mengakui perdagangan narkoba sebagai ancaman keamanan non-tradisional. Perspektif ini memungkinkan adanya respons komprehensif yang melampaui upaya penegakan hukum tradisional. Perdagangan narkoba bersinggungan dengan isu-isu keamanan utama seperti negara-negara nakal dan narkoba, negara-negara lemah dan gagal, pemberontakan, dan terorisme (Montesclaros, 2022).

Keamanan non-tradisional menekankan sifat transnasional dari ancaman-ancaman ini, sehingga memerlukan respons politik, ekonomi, dan sosial yang komprehensif, serta keterlibatan berbagai aktor seperti negara, organisasi internasional, dan aktor non-negara untuk mengatasinya secara efektif. Dengan mempertimbangkan perdagangan narkoba sebagai ancaman keamanan non-tradisional, hal ini membuka peluang bagi pendekatan yang lebih holistik dan multilateral untuk mengatasi masalah ini, lebih dari sekadar respons militer atau penegakan hukum (Das, 2019).

Non-traditional security berbeda dengan *traditional security* dalam menangani perdagangan narkoba dengan mengakui perdagangan narkoba sebagai ancaman keamanan non-tradisional, yang bersinggungan dengan isu-isu keamanan utama seperti negara korup dan narkoba, negara lemah dan gagal, pemberontakan, dan terorisme. Ancaman keamanan tradisional dicirikan oleh penggunaan aset militer yang terlihat oleh aktor negara asing untuk secara serius melemahkan keamanan nasional, sedangkan ancaman non-tradisional bersifat hibrid dan tersebar, sering kali tidak memiliki aspek yang dapat dikenali dengan jelas terkait dengan intervensi militer dan negara (Behera, 2013).

D. Hipotesa

Strategi yang digunakan Presiden Barack Obama, Donald Trump dan Joe Biden dalam mengatasi permasalahan narkoba memiliki pendekatan yang berbeda yaitu pendekatan penegakan hukum melalui undang-undang, hubungan

bilateral Amerika Serikat dengan Meksiko dan program rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba di Amerika Serikat.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab poin-poin yang ada di dalam rumusan masalah dan mengetahui strategi-strategi serta kebijakan apa saja yang sudah dilakukan oleh Presiden Barack Obama, Donald Trump dan Joe Biden dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan narkoba di Amerika Serikat.

F. Metode Penelitian

Metode analisis yang digunakan dalam tulisan ini adalah menggunakan analisis deskriptif. Metode deskriptif kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat post-positivisme. Umumnya digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana seorang peneliti yang akan meneliti merupakan instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian deskriptif kualitatif juga ditujukan untuk menggambarkan, menerangkan serta dapat menjelaskan dan menjawab secara detail mengenai permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari serta memahami seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian. Maka dari itu, Penulis punya maksud menggunakan metode analisis deskriptif ini supaya data yang di dapat memiliki karakteristik untuk menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna sebagai solusi bagi suatu permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan penelitian ini untuk mencari tahu mengenai strategi drug on war Presiden Barack Obama, Donald Trump dan Joe Biden.

G. Jangkauan Penelitian

Untuk membatasi masalah yang akan dijelaskan, penulis membatasi jangkauan waktu pada tahun 2009-2022 dimulai ketika kepemimpinan Presiden Barack Obama, Donald Trump dan sampai Joe Biden menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat.

H. Sistematika Penelitian

Penulis akan membagi 4 bagian bab dalam penelitian yang masing- masing nantinya akan menjelaskan ke dalam sub-bab yang akan membahas lebih detail. Adapun 4 bab tersebut yang akan dibahas, antara lain sebagai berikut.

BAB I : Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, jangkauan penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : Bab ini membahas mengenai perkembangan *Drug on War* dari masa awal kemunculannya yang memiliki dampak buruk terhadap komunitas kulit berwarna dan bagaimana *Drug on War* masih belum bisa diatasi di era modern saat ini

BAB III : Bab ini membahas mengenai program serta kebijakan Presiden Barack, Presiden Donald Trump dan Presiden Joe Biden dalam menangani kasus narkoba di Amerika Serikat melalui *Drug on War* dengan pendekatanserta ciri khas yang berbeda.

BAB IV : Bab ini merupakan rangkuman dan kesimpulan terhadap pembahasan sebelumnya sebagai penutup.